

Program MBG di Indonesia: Tinjauan kasus korupsi dan kelemahan pengawasan

Ulfi Hidayah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ulfihdy27@gmail.com

Kata Kunci:

Korupsi, pengawasan, transparansi, akuntabilitas, integritas

Keywords:

Corruption, oversight, transparency, accountability, integrity

ABSTRAK

Korupsi merupakan masalah serius yang tetap menjadi tantangan utama dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia karena tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat kesejahteraan masyarakat dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Studi ini bertujuan untuk menganalisis fenomena korupsi dalam Program MBG di Indonesia dengan menyoroti bentuk-bentuk penyimpangan dan kelemahan dalam sistem pengawasan yang terjadi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik tinjauan pustaka melalui peninjauan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil diskusi menunjukkan bahwa korupsi dalam Program MBG

dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan nepotisme. Faktor penyebabnya meliputi integritas individu yang rendah, sistem pengawasan yang lemah, kurangnya transparansi, dan kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, masih ditemukan ketidaksetaraan dalam penanganan kasus korupsi, yang menunjukkan sistem hukum yang suboptimal. Dampak dari praktik-praktik ini sangat signifikan, terutama dalam mengurangi efektivitas program, menghambat penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan melemahkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Selain itu, menanamkan nilai-nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab melalui pendidikan anti korupsi juga merupakan langkah penting dalam mencegah praktik korupsi sehingga program dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.

ABSTRACT

Corruption is a serious problem that remains a major challenge in governance in Indonesia because it not only harms state finances but also hinders public welfare and undermines public trust in government institutions. This study aims to analyze the phenomenon of corruption in the MBG Program in Indonesia by highlighting the forms of deviation and weaknesses in the oversight system that occur. The method used is a qualitative approach with literature review techniques through a review of various relevant scientific sources. The results of the discussion indicate that corruption in the MBG Program can occur in various forms, such as budget misuse, data manipulation, and nepotism. Causal factors include low individual integrity, a weak oversight system, a lack of transparency, and a lack of firmness in law enforcement. Furthermore, inequality is still found in the handling of corruption cases, indicating a suboptimal legal system. The impact of these practices is very significant, particularly in reducing program effectiveness, hindering the distribution of targeted aid, and weakening public trust. Therefore, comprehensive improvement efforts are needed through strengthening the oversight system, increasing transparency and accountability, and firm and fair law enforcement. In addition, instilling moral values such as honesty and responsibility through anti-corruption education is also an important step in preventing corrupt practices so that the program can run optimally and provide maximum benefits to the community.



Pendahuluan

Indoensia adalah negara yang sangat memperhatikan nilai-nilai etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat telah diterapkan pada kita sejak kita mulai belajar di sekolah dasar. Tujuan dari pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian kita, sehingga setiap orang yang menjalani kehidupan berdasarkan prinsip-prinsip moral. Kita diharapkan dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar dengan memahami prinsip-prinsip ini.

Salah satu nilai moral dan etika yang paling penting adalah kejujuran dan keadilan. Kejujuran mengajarkan kita untuk selalu bertindak dan berkata yang benar, sementara keadilan memberi tahu kita betapa pentingnya memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik dan harmonis di mana setiap orang menghormati dan mendukung satu sama lain dengan menginternalisasi nilai-nilai ini. Hal ini sangat penting untuk membuat lingkungan menjadi sehat dan sejahtera bagi semua orang. Masalah penting yang mengganggu kehidupan nasional dan internasional adalah korupsi, tindak pidana yang berdampak sistemik pada berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, hukum, dan ekonomi, selain mengganggu keuangan negara. Ketika korupsi meningkat, keadilan sosial menjadi lebih sulit untuk dicapai, kemiskinan meningkat, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. Korupsi masih menjadi penyakit yang membudaya dan berkembang dalam berbagai bentuk yang lebih canggih, sistematis, dan tersembunyi di Indonesia, meskipun banyak lembaga, regulasi, dan kampanye antikorupsi telah didirikan. (Amri et al., 2025)

Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai lembaga dan peraturan untuk memerangi korupsi. KPK bertanggung jawab atas penegakan hukum terkait korupsi. Selaik itu, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah menjadi dasar hukum penting untuk memerangi tindak pidana korupsi. Meskipun berbagai undang-undang telah dibuat, masih ada banyak kesenjangan dalam menangani korupsi di Indonesia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa yang menyeluruh dan penguatan institusi penegak hukum adalah dua langkah penting menuju peningkatan efisiensi penegakan hukum.

Namun, dewasa ini, kita sering melihat berbagai pergeseran yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Banyak orang dan kelompok yang mengabaikan nilai-nilai kejujuran dan keadilan, yang seharusnya menjadi dasar hubungan manusia. Namun, jika kita mempelajarinya lebih jauh, kita akan menemukan bahwa kejujuran dan keadilan bukan hanya ide moral tetapi juga bagian penting dari kehidupan sehari-hari yang harus kita lakukan. Kita dapat meningkatkan hubungan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua dengan mengikuti prinsip-prinsip ini. Tidak peduli kasus korupsi, bicara tentang penyelewengan keadilan dan kejujuran.

Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji dalam konteks Program MBG di Indonesia. Meskipun program ini dirancang dengan tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dalam pelaksanaannya masih ditemukan indikasi kasus korupsi dan lemahnya sistem pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara nilai moral yang diajarkan dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali bagaimana prinsip kejujuran dan keadilan diterapkan dalam pengelolaan program tersebut, serta mengidentifikasi kelemahan pengawasan yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam pelaksanaan Program MBG di Indonesia.

Pengertian Korupsi Secara Umum

Korupsi secara umum dapat dipahami sebagai tindakan penyalahgunaan kekuasaan, jabatan, atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencerminkan pelanggaran terhadap nilai-nilai etika dan moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Korupsi merupakan fenomena multidimensional yang tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah (Indrawan & Adityo, 2024). Dalam perspektif ini, korupsi dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada individu atau lembaga, terutama dalam pengelolaan sumber daya publik. Oleh karena itu, korupsi tidak sekadar tindakan kriminal, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. (Hulaimy, 2025)

Korupsi sering terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta rendahnya integritas individu dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dan kultural. Dalam konteks ini, penguatan nilai-nilai seperti amanah, akuntabilitas, dan keadilan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi.

Pengertian korupsi menjadi landasan penting untuk memahami bagaimana penyimpangan dapat terjadi dalam pelaksanaan suatu program publik. Korupsi dalam program MBG dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, hingga praktik nepotisme. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sistem pengawasan yang kuat dan integritas pelaksana yang tinggi, tujuan program yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dapat diselewengkan untuk kepentingan tertentu. Dengan demikian, pemahaman mengenai korupsi secara umum tidak hanya terbatas pada definisi, tetapi juga mencakup kesadaran akan dampak dan faktor penyebabnya, sehingga dapat menjadi dasar dalam menganalisis serta mencegah terjadinya korupsi, khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah seperti MBG.

Pembahasan

Hingga saat ini, korupsi masih merupakan salah satu masalah besar di Indonesia. Praktik ini tidak hanya membuat negara kehilangan uang, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena program MBG pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

korupsi menjadi isu penting untuk dikaji dalam konteks program ini di Indonesia. Namun, berbagai faktor, terutama lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, membuat kemungkinan kesalahan tetap ada saat menjalankannya.

Penanganan kasus korupsi di Indonesia terus menunjukkan ketimpangan, baik dalam proses hukum maupun dalam hasil yang diterima oleh pelaku. Ini dapat dilihat dari perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku korupsi dengan latar belakang kekuasaan atau jabatan. Kondisi ini memberi kesan bahwa hukum belum tegas dan adil sepenuhnya. Selain itu, efektifitas pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum. Jika mereka yang bertanggung jawab menjalankan hukum terlibat dalam praktik yang tidak transparan, kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan menurun.

Sebaliknya, sistem pengawasan yang tidak memadai juga merupakan faktor utama yang meningkatkan kemungkinan korupsi dalam program pemerintah seperti program MBG ketidak tertiban sistem pengawasan kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan semuanya merupakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyimpangan kondisi ini juga diperburuk oleh kekurangan koordinasi antar lembaga pengawas akibat berbagai jenis korupsi seperti penyalahgunaan anggaran, manipulasi data, dan nepotisme dapat terjadi tanpa disadari.

Korupsi dalam Program MBG juga tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya integritas individu, lemahnya moralitas, serta kurangnya kesadaran akan nilai kejujuran dan tanggung jawab. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan sistem yang belum kuat, lemahnya regulasi, serta budaya organisasi yang cenderung permisif terhadap praktik korupsi. Korupsi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan, sehingga tidak hanya menjadi pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral yang mendasar.

Dampak dari korupsi dalam program MBG sangat signifikan, terutama bagi masyarakat sebagai penerima manfaat. Penyalahgunaan anggaran dapat menyebabkan berkurangnya kualitas dan kuantitas bantuan yang diberikan, sehingga program tidak berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Selain itu, distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran juga dapat menimbulkan ketidakadilan sosial di masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menghambat upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya komprehensif dan berkelanjutan. Penguatan sistem pengawasan menjadi langkah penting yang harus dilakukan, baik melalui peningkatan transparansi, perbaikan mekanisme laporan, maupun pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan. Selain itu, penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa diskriminasi agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Tidak kalah penting, penanaman nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab melalui pendidikan anti korupsi juga perlu ditingkatkan untuk membentuk karakter individu yang berintegritas.

Dengan demikian, pemberantasan korupsi dalam Program MBG tidak hanya bergantung pada aspek hukum semata, tetapi juga memerlukan sinergi antara sistem

pengawasan yang kuat, penagakan hukum yang adil, serta pembentukan karakter moral yang baik. Upaya yang terintegritas ini diharapkan mampu meminimalisir praktik korupsi sehingga tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Dalam praktiknya, korupsi dalam program pemerintah seperti MBG tidak hanya terjadi dengan cara-cara sederhana, tetapi seringkali dilakukan secara sistematis dan terselubung. Para pelaku korupsi memanfaatkan celah administratif dan kelemahan sistem untuk menghindari pengawasan. Misalnya, laporan keuangan dimanipulasi, seolah-olah sesuai dengan prosedur, padahal sebenarnya ada pengurangan atau pengalihan dana yang tidak sesuai dengan tujuan program. Lebih lanjut, praktik penggelembungan anggaran adalah bentuk korupsi umum lainnya, di mana harga pengadaan barang atau jasa dinaikkan di atas harga sebenarnya untuk keuntungan pribadi.

Fenomena lain yang juga sering muncul adalah praktik nepotisme dalam penentuan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Dalam hal ini, pemilihan rekanan atau pelaksana program tidak didasarkan pada kompetensi, melainkan pada kedekatan pribadi atau kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja berdampak pada kualitas pelaksanaan program yang menjadi tidak optimal. Akibatnya, tujuan utama dari Program MBG untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sulit tercapai secara maksimal. Selain faktor teknis dan struktural, budaya organisasi juga memiliki peran penting dalam mendorong atau mencegah terjadinya korupsi. Lingkungan kerja yang tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran dan akuntabilitas cenderung lebih rentan terhadap praktik korupsi. Ketika perilaku tidak jujur dianggap sebagai hal yang biasa atau bahkan dibiarkan, maka hal tersebut dapat berkembang menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan budaya organisasi yang berintegritas, di mana setiap individu memiliki komitmen untuk menjalankan tugas secara jujur dan bertanggung jawab.

Kelemahan Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penegakan hukum memegang peranan yang sangat penting sebagai instrument utama dalam menciptakan keadilan dan efek jera. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan yang menghambat efektivitasnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurul Latifah yang menyoroti adanya ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi, baik dari segi proses hukum maupun hasil akhir yang diterima oleh pelaku (Latifah, 2025).

Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya konsistensi dalam penerapan hukum terhadap pelaku korupsi. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan perlakuan antara pelaku dengan latar belakang tertentu, sehingga menimbulkan kesan bahwa hukum belum sepenuhnya adil dan tegas. Selain itu, faktor integritas aparat penegak hukum juga menjadi sorotan penting. Ketika aparat yang seharusnya menegakkan keadilan justru terlibat dalam praktik yang tidak transparan, maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum akan semakin menurun.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor yang memperburuk penanganan kasus korupsi. Proses yang panjang dan birokratis sering membuka celah bagi terjadinya manipulasi atau intervensi dari pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan korupsi tidak hanya terletak pada individu pelaku, tetapi juga pada sistem yang belum berjalan secara optimal.

Dalam konteks Program MBG di Indonesia, kelemahan penegakan hukum ini dapat berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program. Ketika pengawasan tidak berjalan dengan baik dan penindakan terhadap pelanggaran tidak tegas, maka potensi terjadinya penyalahgunaan wewenang menjadi semakin besar. Hal ini dapat mengakibatkan tujuan program yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru tidak tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang menyeluruh, baik dari segi peningkatan integritas aparat penegak hukum, penguatan sistem pengawasan, maupun penerapan sanksi yang tegas dan adil. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berfungsi secara optimal dalam mencegah dan memberantas korupsi, khususnya dalam pelaksanaan program-program pemerintah seperti MBG.

Pancasila dan Pendidikan Anti Korupsi

Pendidikan antikorupsi adalah upaya untuk secepat mungkin menumbuhkan sikap antikorupsi pada siswa. Untuk mencapai tujuan ini, guru harus bertindak dengan motivasi tulus untuk membangun peradaban yang lebih baik dan bebas korupsi. Jika pendidikan antikorupsi dilihat dari sudut pandang perspektif yang lebih luas dan mendalam, kita akan memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam, kita akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pendidikan antikorupsi sebagai komponen pembelajaran yang unik dan unik dari sudut pandangan moral. Untuk mencapai hal ini, guru harus benar-benar bermula dari keinginan untuk menciptakan peradaban baru yang lebih baik dan bebas dari ketidakadilan. Jika pendidikan antikorupsi ditinjau dari sudut pandang yang lebih mendalam tentang masalah moral, kita akan melihat pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari pendidikan karakter dari pendidikan antikorupsi (Halimah et al., 2021).

Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi menjadi sarana penting dalam membentuk mahasiswa yang memiliki komitmen terhadap nilai-nilai moral bangsa. Nilai-nilai Pancasila memberikan pedoman etis bagi perilaku akademik maupun sosial mahasiswa sehingga dapat menumbuhkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan kampus. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui pembelajaran Pancasila berbasis project citizen, yang mengintegrasikan pendidikan karakter dengan pembiasaan etika akademik. Melalui penerapan tersebut, mahasiswa akan lebih memahami pentingnya menjunjung tinggi kejujuran serta menolak berbagai bentuk kecurangan akademik. Pendidikan antikorupsi yang berlandaskan nilai Pancasila tidak hanya membangun kesadaran moral, tetapi juga memperkuat pemahaman rasional mengenai pentingnya keadilan dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai ruang pembentukan karakter untuk menciptakan generasi yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi (Mulyoto, 2020).

Nilai-nilai Pancasila memiliki kekuatan transformasional yang dapat memengaruhi perilaku mahasiswa secara menyeluruh melalui pendekatan kontekstual dan keteladanan dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. Pendidikan yang berlandaskan Pancasila dinilai mampu menanamkan sikap nasionalisme, disiplin, tanggung jawab, serta membentuk pandangan hidup yang jujur dan adil. Dalam lingkungan akademik, penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan juga dapat menciptakan budaya belajar yang bersih, bermartabat, dan berintegritas. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat melalui sikap kritis yang konstruktif dan dialog antar generasi agar tetap relevan di era globalisasi (Putri et al., 2025). Dengan demikian, perguruan tinggi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan akademik, tetapi juga sebagai ruang pembentukan karakter moral yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tindakan akademik maupun sosial (Dewi, 2026)

Mengatakan bahwa nilai-nilai Islam dalam Pancasila sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan anti-korupsi. Ketika nilai religious diintegrasikan dengan Pancasila, mahasiswa menjadi lebih moral dan bertanggung jawab. Universitas harus mengembangkan program studi yang mengaitkan nilai-nilai agama dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan moral. Mereka yang belajar tentang hubungan antara moralitas dan etika sosial akan lebih peka terhadap bahaya korupsi. Integritas pribadi yang kuat didorong oleh prinsip keadilan dan ketuhanan. Pendidikan antikorupsi dengan pendekatan nilai akan lebih baik dalam meningkatkan kesadaran moral. Sebagai pendidik, dosen memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui perilaku yang contoh. Pembelajaran yang didasarkan pada nilai-nilai nasinal da religious akan menciptakan suasana akademik yang kuat.

Kesimpulan dan Saran

Korupsi merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam konteks Program MBG di Indonesia, korupsi muncul sebagai akibat dari lemahnya sistem pengawasan, ketidaktegasan penegakan hukum, serta rendahnya integritas individu yang terlibat dalam pelaksanaan program. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan seperti manipulasi anggaran, manipulasi data, dan praktik nepotisme, yang pada akhirnya menghambat tercapainya tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan, diperlukan langkah-langkah strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pertama, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dengan meningkatkan transparansi, memperbaiki mekanisme pelaporan, serta melibatkan masyarakat dalam proses kontrol sosial. Kedua, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, adil, dan konsisten tanpa adanya diskriminasi terhadap pelaku korupsi. Ketiga, penting untuk menanamkan nilai-nilai moral dan integritas melalui pendidikan anti korupsi berbasis Pancasila dan nilai keagamaan guna membentuk karakter individu yang jujur dan bertanggung jawab.

Dengan adanya upaya yang terintegrasi antara penegakan sistem, penegakan hukum, dan pembentukan karakter, diharapkan praktik korupsi dalam Program MBG

dapat diminimalisir sehingga program tersebut dapat berjalan secara efektif, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Amri, M., Utomo, S., Karisma, N., Haikal, A., Alam, S., & Taqiya, S. (2025). Integrasi nilai-nilai kejujuran dan keadilan sebagai pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi menurut analisis Al- qur ' an dan Hadits. 3, 485–494.
- Dewi, A. F. (2026). Pancasila dan pendidikan anti korupsi: Peran pendidikan pancasila terhadap pembentukan sikap anti korupsi mahasiswa generasi z. 4, 73–76.
- Halimah, L., Fajar, A., & Hidayah, Y. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Melalui Matakuliah Pancasila : Tingkatan Dalam Memahami Kejujuran. 5, 1–14.
- Hulaimy, A. A. (2025). SiyasaH maliyah islamiyah sebagai upaya mitigasi dalam fenomena korupsi. 3, 72–78.
- Indrawan, I., & Adityo, R. D. A. R. D. (2024). Reformasi Hukum dan Pembuktian Kasus Korupsi Gratifikasi Di Indonesia. Deepublish Publisher. <https://repository.uin-malang.ac.id/22516/>
- Latifah, N. (2025). Ketimpangan hukum dalam penanganan korupsi. 3, 618–622.
- Mulyoto, G. P. (2020). Pengembangan Modul Praktikum Mata Kuliah Pancasila Dengan Model Project Citizen Untuk Menanamkan Nilai-Nilai Antikorupsi Pada Mahasiswa. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 17(1), 67–80. <http://repository.uin-malang.ac.id/5730/>
- Putri, V. F. A., Pratiwi, I. H., & Hidayatullah, A. D. (2025). Kritisisme Konstruktif dan Dialog Antar Generasi: Mewujudkan Pancasila yang Relevan di Era Globalisasi. *ARembeN Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 3(1), 25–34. <https://repository.uin-malang.ac.id/24556/>